

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penipuan akuntansi semakin menjadi masalah yang menonjol dan sering disoroti dalam pemberitaan media. Kecenderungan untuk melakukan tindakan semacam itu muncul ketika seseorang melihat adanya peluang untuk melakukannya (Atmadja dkk., 2024). penipuan akuntansi mengacu pada tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memengaruhi laporan keuangan dan dapat menyebabkan kerugian bagi suatu entitas atau pihak terkait lainnya. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan penipuan akuntansi ke dalam tiga kategori utama: korupsi, penyalahgunaan aset, dan laporan keuangan yang menipu.

Organisasi yang beroperasi di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan, sering dianggap sebagai pihak yang paling rentan terhadap penipuan. Lembaga-lembaga ini memegang peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara karena sebagian besar transaksi keuangan berlangsung melalui layanan perbankan maupun non-perbankan di tingkat daerah dan desa. Di Bali, salah satu contoh lembaga semacam itu adalah Lembaga Penyelenggara Dana Desa (LPD), yang dimiliki oleh desa-desa adat. Pembentukan LPD muncul dari kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam masyarakat, yang diekspresikan melalui organisasi desa adat. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002, LPD dibentuk untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan mendorong kebiasaan menabung di kalangan masyarakat, menyediakan kredit bagi

usaha skala kecil, mencegah praktik pemberian pinjaman yang eksploitatif, menciptakan peluang usaha yang setara di tingkat desa, serta meningkatkan peredaran uang di daerah pedesaan.

Kasus-kasus penipuan di LPD terus bermunculan. Sejumlah LPD bahkan mengalami masalah serius yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Di Bali, salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan LPD yang pesat adalah Kota Denpasar, yang saat ini memiliki 35 LPD yang tersebar di berbagai wilayahnya. Namun, di balik ekspansi yang pesat ini, sejumlah LPD di Denpasar juga menghadapi berbagai masalah operasional dan keuangan. Berikut gambar data perkembangan Aset LPD yang berada di Kota Madya Denpasar yang ditampilkan pada Gambar 1.1.



*Gambar 1.1 Data Perkembangan Aset LPD
Sumber data: LPLPD Provinsi Bali (2025)*

Berdasarkan data tersebut, peneliti mengidentifikasi adanya potensi kecurangan pada LPD di Kota Madya Denpasar. Potensi tersebut muncul karena tingginya aset yang dimiliki LPD, sehingga dapat membuka peluang bagi pihak

tertentu untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Selain itu, LPD di Kota Madya Denpasar juga menghadapi tantangan berupa masalah kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian material, khususnya apabila melibatkan karyawan dengan integritas yang rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti menetapkan LPD di Kota Madya Denpasar sebagai objek penelitian karena wilayah ini memiliki kompleksitas permasalahan dan potensi kecurangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dua kasus kecurangan yang pernah terjadi di Kota Madya Denpasar sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Kasus *Fraud* pada LPD di Kota Madya Denpasar

No	Tahun	Kasus
1	LPD Serangan/2022	Dugaan korupsi di LPD Serangan terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dan kurangnya pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Tersangka membuat 17 kredit fiktif dan memanipulasi pencatatan buku kas. Kejari Denpasar telah menetapkan dua tersangka: IWJ, kepala LPD periode 2015-2020, dan NWSY, pegawai tata usaha pada periode yang sama. Total kerugian akibat kasus ini mencapai Rp3.749.118.000, dengan penangkapan dilakukan pada 6 Juni 2022.
2	LPD Intaran/2025	Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang oleh I Wayan Mudana dalam penggunaan dana LPD Adat Intaran, Sanur Kauh, Denpasar, yang sebagian besar bersumber dari bantuan Pemprov Bali. Mudana diduga menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2014, ia mengajukan kredit sebesar Rp 400 juta dengan jangka waktu hingga Maret 2017. Namun, dari 26 Maret 2016 hingga 31 Agustus 2018, Mudana dilaporkan menarik dana pinjaman hingga Rp 8.118.663.000, melebihi plafon yang disepakati. Penahanan dilakukan pada 23 Januari 2025. Total kerugian yang diperkirakan Mencapai Rp1.600.000.000.
3	LPD Yang Batu/2025	Sejak 2008 pemberian pinjaman dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan, tanpa analisis kredit yang

No	Tahun	Kasus
		memadai dan tanpa jaminan yang sah, I Putu Sumadi menyelewengkan dana LPD secara berlanjut sejak 2008 hingga 2023 atau selama 15 tahun yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2,62 miliar.

Sumber: data diolah (2026)

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat tindakan *fraud* dalam proses mengelola keuangan yang dilakukan oleh pengurus di LPD yang ada di Kota Madya Denpasar. Selain yang tertera pada tabel peneliti juga mendapatkan informasi bahwa ada kasus kecurangan di LPD tonja dan LPD Pagan masalah tersebut diselesaikan secara internal dan kekeluargaan akan tetapi kasus tersebut tidak terpublis ke media sosial. Berdasarkan laporan-laporan tersebut, dapat dipahami bahwa LPD di Kota Denpasar sedang menghadapi tantangan yang serius. Kondisi ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mendorong individu untuk melakukan praktik-praktik penipuan, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat dikembangkan untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus semacam itu. Meminalkan *fraud* sangat penting karena mendukung pencapaian tujuan organisasi dan membantu memastikan kelancaran kegiatan kelembagaan. Motif di balik *fraud* akuntansi dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, yang membuat masalah ini menjadi sangat kompleks. Karena alasan ini, penipuan akuntansi tetap menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lembaga keuangan, termasuk LPD di Kota Denpasar.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi meliputi asimetri informasi, pengendalian internal yang lemah, dan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* yang tidak optimal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk menjaga integritas dan

keberlanjutan LPD. Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya (Lubis & Pratiwi, 2020). Dalam konteks LPD, pengelola lembaga seringkali memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi keuangan dan operasional dibandingkan dengan anggota masyarakat atau nasabah. Di Kota Madya Denpasar, jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kondisi keuangan LPD, mereka menjadi lebih rentan terhadap tindakan kecurangan. Ketidapkahaman ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola untuk melakukan manipulasi laporan keuangan atau penggelapan dana, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Asimetri informasi terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat dan meningkatkan risiko kecurangan.

Dalam konteks LPD, asimetri informasi dapat muncul antara manajemen dan pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan regulator. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana asimetri informasi dapat mempengaruhi perilaku kecurangan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Selanjutnya, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Ariestina & Wahyuni, 2021). Pengendalian internal yang kuat dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dan diaudit dengan baik. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas pengendalian internal yang diterapkan di LPD dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam mencegah kecurangan. Pengendalian internal yang lemah juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan risiko kecurangan.

Sistem pengendalian internal yang efektif berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan cara mengatur prosedur dan kebijakan yang jelas. Di LPD, tidak ada mekanisme pengendalian yang memadai, seperti audit internal yang rutin dan pemisahan tugas yang jelas, maka peluang untuk terjadinya kecurangan akan meningkat. Ketiadaan pengendalian internal yang kuat dapat menciptakan celah bagi individu untuk melakukan tindakan yang merugikan lembaga dan masyarakat.

Implementasi *Good Corporate Governance* juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. *GCG* mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap LPD (Saftarini dkk., 2015). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip *GCG* dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan integritas lembaga. Implementasi *Good Corporate Governance* (*GCG*) yang tidak optimal juga berkontribusi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam penelitian ini mencakup prinsip-prinsip *GCG* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam pengelolaan lembaga. Di LPD Kota Madya Denpasar, jika prinsip-prinsip *GCG* tidak diterapkan dengan baik, maka akan sulit untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan ketidakpastian dan kecurigaan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kecurangan oleh pengelola yang merasa tidak diawasi.

Teori yang menjelaskan tentang motivasi tersebut adalah *fraud triangle theory*. *Fraud Triangle* adalah teori yang menjelaskan tiga elemen utama yang

mendorong terjadinya kecurangan, yaitu: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori *fraud triangle* dalam konteks penelitian ini, Asimetri informasi dan Pengendalian internal masuk kedalam aspek peluang dikarenakan asimetri informasi menciptakan peluang bagi pengelola LPD untuk melakukan kecurangan (Agustin, 2025). Ketika pengelola memiliki akses lebih besar terhadap informasi keuangan dibandingkan dengan masyarakat atau nasabah, mereka dapat memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan manipulasi laporan keuangan atau penggelapan dana, dan pengendalian internal yang lemah memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan kecurangan. Jika tidak ada mekanisme pengendalian yang memadai, seperti audit internal dan pemisahan tugas, maka peluang untuk melakukan kecurangan akan meningkat. Pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Sedangkan GCG masuk kedalam aspek tekanan dan rasionalisasi dikarenakan implementasi GCG yang tidak optimal dapat menciptakan tekanan bagi pengelola untuk mencapai target tertentu, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kecurangan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat menciptakan peluang bagi tindakan kecurangan. Kurangnya budaya etika akibat GCG buruk memudahkan pelaku membenarkan Tindakan, Pengurus merasa "aman" karena masyarakat tidak memahami detail keuangan dan Sistem yang mudah ditembus memperkuat rasionalisasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, asimetri informasi, lemahnya pengendalian internal, dan implementasi GCG yang belum optimal merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan berpotensi menciptakan lingkungan yang

kondusif terhadap terjadinya kecurangan akuntansi pada LPD di Kota Madya Denpasar. Oleh karena itu, penting bagi LPD untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor ini agar dapat mencegah kecurangan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan operasional lembaga. Upaya untuk memperkuat pengendalian internal dan menerapkan prinsip-prinsip *GCG* yang baik akan sangat berkontribusi dalam menciptakan LPD yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan (Saftarini dkk., 2015).

Dampak dari kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan lembaga sejenis dapat sangat merugikan, baik bagi lembaga itu sendiri maupun masyarakat yang bergantung pada layanan mereka. Sebagai contoh, studi kasus di salah satu LPD di Kota Madya Denpasar yaitu LPD sanur dan LPD serangan menunjukkan bahwa setelah terjadinya penggelapan dana oleh oknum pengelola, lembaga tersebut mengalami penurunan simpanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi tidak hanya merugikan lembaga secara finansial, tetapi juga mengancam keberlanjutan operasional dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada layanan keuangan tersebut.

Dengan maraknya kasus kecurangan akuntansi di LPD Kota Madya Denpasar yang menimbulkan kerugian material dan erosi kepercayaan masyarakat, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pemicunya, yaitu asimetri informasi, pengendalian internal yang lemah, dan *implementasi Good Corporate Governance (GCG)* yang tidak optimal. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menyediakan rekomendasi strategis yang berbasis bukti guna memperkuat tata kelola dan sistem pengendalian

internal LPD, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan, memulihkan serta menjaga kepercayaan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan LPD sebagai pilar penggerak ekonomi desa yang stabil dan akuntabel.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Lyana & Sujana, 2021) Pengaruh Komitmen Organisasi, *Locus of Control* Dan Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Seririt yang mana hasil dari penelitian (Lyana & Sujana, 2021) komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt, locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt dan implementasi *good governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang hubungan antara variabel-variabel dengan mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh (Lyana & Sujana, 2021) Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian (Lyana & Sujana, 2021) terletak pada objek penelitian, di mana (Lyana & Sujana, 2021) kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan seririt, sementara penelitian ini memusatkan pada kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Madya Denpasar. Selain objek penelitian yang berbeda, penelitian ini juga mengubah variabel independen seperti menggantikan komitmen organisasi dengan asimetri informasi (X1) dikarenakan pada penelitian

sebelumnya komitmen organisasi sudah teruji dan valid. Menggantikan *locus of control* dengan pengendalian internal (X2) dikarenakan masih ada inkonsistensi dari penelitian. Perbedaan lainnya adalah dalam periode penelitian, dimana (Lyana & Sujana, 2021) menggunakan periode penelitian tiga tahun dari 2018 hingga 2020, sedangkan penelitian ini memperluas periode penelitian menjadi lima tahun dari 2020 hingga 2024 untuk memastikan data yang terkumpul lebih lengkap dan informatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan pada LPD melalui pengkajian variabel asimetri informasi, pengendalian internal, dan implementasi good corporate governance. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola LPD dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dan implementasi GCG, serta mengurangi risiko kecurangan yang dapat merugikan lembaga dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi dan keuangan mikro.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, dan Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Madya Denpasar”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Terdapat dua kasus kecurangan yang teridentifikasi LPD di Kecamatan Denpasar Selatan. Kasus pertama pada tahun 2022 melibatkan kerugian keuangan sebesar Rp3.749.118.000 akibat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana kerja. Kasus kedua pada tahun 2025 melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pengelola LPD yang menyebabkan kerugian sebesar Rp1.600.000.000.
2. Setelah terjadinya kasus penggelapan dana, salah satu LPD mengalami penurunan simpanan masyarakat. Penurunan ini mengindikasikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pembatasan penelitian perlu untuk dilakukan agar peneliti dapat lebih terfokus pada masalah dan tujuan penelitian. Peneliti membatasi variabel penelitian yang hanya terdiri dari tiga variabel bebas yaitu Asimetri informasi, Pengendalian internal, dan Implementasi *Good Corporate Governance* dan satu variabel terikat yaitu Kecenderungan kecurangan akuntansi (*Fraud*) dengan objek penelitian yakni Lembaga Perkreditan Desa di Kota Madya Denpasar.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah asimetri informasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kota Madya Denpasar?
2. Apakah pengendalian internal mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kota Madya Denpasar?
3. Apakah implementasi GCG mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kota Madya Denpasar?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kota Madya Denpasar.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kota Madya Denpasar.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh implementasi GCG terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kota Madya Denpasar.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana asimetri informasi, pengendalian internal, dan penerapan tata kelola yang baik memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi di LPD di Kota Denpasar. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi peneliti lain atau pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan pengetahuan akuntansi, khususnya di bidang Akuntansi Forensik, yang telah diperoleh selama menempuh studi di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan, sumber bacaan, dan informasi yang dapat memperkaya khazanah literatur yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji dampak asimetri informasi, pengendalian internal, dan penerapan tata kelola yang baik terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi.

c. Bagi LPD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi upaya pencegahan penipuan di sektor lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan dan pertimbangan bagi manajemen serta karyawan LPD dalam mengelola dana publik secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan, khususnya LPD. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengaruh asimetri informasi dan praktik *Good Corporate Governance*, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai kinerja lembaga keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lembaga keuangan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya dalam transaksi keuangan.

